



Anggaran Penyelenggaraan Pemilu: Analisis Biaya per Pemilih dan Determinannya di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (2014, 2019, 2024)

Sitti Aisah Matdoan^{1*}, Amaluddin², William George M Louhenapessy³

¹ Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Terapan, Universitas Pattimura, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Indonesia

³ Pascasarjana Ekonomi Terapan, Universitas Pattimura, Indonesia

* Penulis korespondensi: sitlais4h@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the factors affecting the efficiency of election administration budgets at the regency/municipality level in Maluku Province, as measured by cost per voter. The three main variables examined are population density, the level of digitalization of the electoral process, and procurement competition. The study employs panel data covering 11 regencies/municipalities across three election periods (2014, 2019, and 2024), analyzed using a Fixed Effects Model (FEM) panel regression approach. The results show that population density (X1) and the level of electoral process digitalization (X2) have negative and significant effects on cost per voter (Y). These findings indicate that areas with higher population density and greater adoption of digital systems are able to reduce the average cost per voter, consistent with the principles of economies of scale and transaction cost efficiency. In contrast, procurement competition (X3) has a negative but statistically insignificant effect, implying that variations in the number of tender participants have not yet produced a substantial impact on election cost efficiency in archipelagic areas characterized by a limited number of goods and service providers. These results confirm that fiscal efficiency in election administration in Maluku is determined more by structural factors and technological capacity than by procurement market factors. Therefore, policies aimed at strengthening the digitalization of electoral systems and improving population-related infrastructure are crucial for achieving efficient and equitable election budget management across regions.*

Keywords: *Cost Per Voter; Electoral Digitalization; Fiscal Efficiency; Population Density; Procurement Competition.*

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Maluku, yang diukur melalui biaya per pemilih. Tiga variabel utama yang dikaji meliputi kepadatan penduduk, tingkat digitalisasi proses pemilu, dan kompetisi pengadaan. Data yang digunakan merupakan data panel 11 kabupaten/kota selama tiga periode pemilu (2014, 2019, dan 2024), yang diolah menggunakan model regresi data panel efek tetap (Fixed Effects Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk (X1) dan tingkat digitalisasi proses pemilu (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya per pemilih (Y). Temuan ini mengindikasikan bahwa daerah dengan populasi padat dan penerapan sistem digital yang lebih tinggi mampu menekan biaya rata-rata per pemilih, sejalan dengan prinsip economies of scale dan transaction cost efficiency. Sebaliknya, kompetisi pengadaan (X3) memiliki arah pengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik, yang mengimplikasikan bahwa variasi jumlah peserta tender belum memberikan dampak nyata terhadap efisiensi biaya pemilu di wilayah kepulauan dengan keterbatasan penyedia barang dan jasa. Hasil ini menegaskan bahwa efisiensi fiskal dalam penyelenggaraan pemilu di Maluku lebih banyak ditentukan oleh faktor struktural dan kapasitas teknologi dibandingkan faktor pasar pengadaan. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan digitalisasi sistem pemilu dan penguatan infrastruktur kependudukan menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan anggaran pemilu yang efisien dan berkeadilan antarwilayah.

Kata Kunci: Biaya Per Pemilih; Digitalisasi Pemilu; Efisiensi Fiskal; Kepadatan Penduduk; Kompetisi Pengadaan.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemilu merupakan proses demokrasi yang tidak hanya memiliki dimensi politik, tetapi juga dimensi ekonomi publik yang sangat signifikan. Setiap tahapan pemilu mulai dari perencanaan, logistik, rekrutmen penyelenggara, hingga rekapitulasi suara

membutuhkan alokasi anggaran yang besar dari kas negara dan daerah. Menurut Surbakti (2013) dalam kajiannya di Jurnal Politik Indonesia, tantangan terbesar penyelenggara pemilu di Indonesia bukan hanya menjaga integritas proses politik, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan mencerminkan prinsip *value for money* efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam kebijakan fiskal, efisiensi anggaran pemilu menjadi indikator penting sejauh mana lembaga publik seperti KPU mampu menerjemahkan akuntabilitas demokrasi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang rasional dan berkelanjutan (Putra et al., 2026).

Di berbagai negara, salah satu ukuran universal efisiensi penyelenggaraan pemilu adalah biaya per pemilih (*cost per voter*). Ukuran ini memungkinkan perbandingan lintas waktu maupun antar wilayah, karena merepresentasikan beban ekonomi per individu yang difasilitasi negara dalam proses demokrasi. James dan Jervier (2017) dalam *Electoral Studies* menjelaskan bahwa biaya pemilu sangat dipengaruhi oleh variabel struktural seperti kepadatan penduduk, kondisi geografis, serta adopsi teknologi informasi. Dalam konteks Indonesia, besaran biaya per pemilih menunjukkan disparitas yang cukup tajam antar kabupaten/kota, terutama antara daerah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah dengan infrastruktur digital maju dan wilayah tertinggal. Ketimpangan ini menandakan adanya determinan ekonomi dan kelembagaan yang perlu ditelusuri secara ilmiah.

Penelitian tentang efisiensi biaya pemilu juga beririsan dengan teori ekonomi skala (*economies of scale*) dan biaya transaksi publik (*public transaction cost*). Daerah dengan populasi besar dan infrastruktur logistik yang baik cenderung menikmati average cost yang lebih rendah karena distribusi beban biaya pada jumlah pemilih yang lebih besar (Clark, 2019). Sebaliknya, daerah kepulauan dan terpencil seperti di Maluku atau Papua menghadapi *diseconomies of scale*, di mana biaya transportasi, komunikasi, dan distribusi logistik meningkat secara non-linear terhadap output/jumlah pemilih (Risamasu, 2025). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Melo dan Stockemer (2014) dalam *Electoral Studies*, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di negara-negara kepulauan selalu menghadapi biaya logistik dan administratif yang lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.

Selain faktor geografis dan demografis, efisiensi anggaran pemilu juga ditentukan oleh faktor kelembagaan dan tata kelola. Grandia dan Meehan (2017) dalam *International Journal of Public Sector Management* menegaskan bahwa pengadaan publik (*public procurement*) berperan penting dalam menentukan tingkat efisiensi lembaga penyelenggara pemilu. Daerah dengan tingkat kompetisi vendor yang tinggi dan sistem pengadaan yang transparan mampu menurunkan biaya logistik hingga 15–25% dibandingkan daerah dengan struktur pasar

penyedia yang oligopolistic (Firdausy, 2021). Di Indonesia, penerapan sistem *e-procurement* dan digitalisasi pemutakhiran data pemilih (melalui Sidalih dan Sirekap) secara teoritis diharapkan meningkatkan efisiensi fiskal, meskipun dampak nyatanya belum sepenuhnya terukur secara empiris (Novianto et al., n.d.). Analisis ini penting bukan hanya untuk menilai performa fiskal KPU daerah, tetapi juga untuk menyusun peta kebijakan pembiayaan pemilu yang lebih berkeadilan antarwilayah.

2. KAJIAN TEORITIK

Efisiensi Biaya

Efisiensi penyelenggaraan pemilu berakar pada landasan teoritis yang lebih luas mengenai efisiensi pengeluaran publik dan ekonomi kelembagaan. Kerangka value for money, yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (tiga “E”), menjadi konsep sentral dalam menilai kinerja belanja sektor public (Hood, 1991; Robinson dan Last, 2010). Dalam konteks manajemen pemilu, efisiensi merujuk pada pemanfaatan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai pemilu yang kredibel, inklusif, dan transparan (James, 2020; Norris dan Grömping (2019). Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, perbedaan biaya administrasi antarwilayah muncul akibat variasi kapasitas lokal, skala kegiatan, dan pengaturan kelembagaan (Oates, 1999; Shah dan Thompson (2004). Oleh karena itu, disparitas biaya per pemilih antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku dapat dipahami melalui lensa fiskal dan kelembagaan ini, di mana tantangan logistik lokal, kondisi geografis, serta kapasitas tata kelola berperan sebagai faktor mediasi (Hill, 2012; Clark 2019).

Dari perspektif ekonomi skala (economies of scale), efisiensi biaya penyelenggaraan pemilu meningkat seiring bertambahnya jumlah pemilih atau kepadatan tempat pemungutan suara (TPS), karena biaya tetap dapat tersebar pada basis penerima manfaat yang lebih besar (Mohr et al., 2018). Sebaliknya, wilayah dengan populasi yang tersebar seperti daerah kepulauan atau pegunungan cenderung menghadapi *diseconomies of scale* akibat meningkatnya biaya logistik dan transaksi (Nainggolan, 2020). Prinsip ini sejalan dengan teori biaya transaksi dari Coase (1952), yang menyatakan bahwa pengaturan kelembagaan dan adopsi teknologi menentukan sejauh mana biaya dapat diminimalkan. Dalam penyelenggaraan pemilu, tingginya biaya transaksi dapat disebabkan oleh jaringan pemasok yang terfragmentasi, infrastruktur transportasi yang buruk, atau lemahnya koordinasi pengadaan (Kauzya, 2021). Inovasi teknologi, termasuk digitalisasi data pemilih dan sistem *e-procurement*, berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi biaya koordinasi, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan efisiensi biaya (James et al., 2019; Garnett dan James, 2020)

Interaksi antara kualitas kelembagaan dan disiplin fiskal juga berperan penting dalam membentuk efisiensi anggaran pemilu. Berdasarkan pendekatan Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economics), mekanisme tata kelola seperti transparansi pengadaan, akuntabilitas antar-lembaga, dan penganggaran berbasis kinerja menentukan bagaimana lembaga publik mengalokasikan serta memanfaatkan sumber daya (North, 2019; J. A. Robinson dan Acemoglu (2012). Studi empiris dalam bidang keuangan publik menunjukkan bahwa sistem pengadaan yang transparan dapat menurunkan pengeluaran pemerintah hingga 25% tanpa menurunkan kualitas layanan (Thai, 2017; Catindin dan Arnado (2025). Dalam hal pemilu, keberadaan tender kompetitif, platform e-procurement, dan audit kinerja menjadi determinan penting bagi efisiensi biaya (Surbakti & Supriyanto, 2019; Rose-Ackerman, 2019). Oleh karena itu, integrasi teori ekonomi skala, biaya transaksi, dan tata kelola kelembagaan memberikan landasan analitis yang komprehensif untuk menjelaskan variasi efisiensi pengeluaran pemilu antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Sintesis teoretis ini tidak hanya memperkaya literatur manajemen keuangan publik dalam lembaga demokratis, tetapi juga memperkuat evaluasi empiris terhadap akuntabilitas fiskal dalam sistem administrasi pemilu (James dan Jervier, 2017; Norris (2015).

Teori Administrasi Publik

Perkembangan teori administrasi publik dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Pada awal perkembangannya, administrasi publik sangat dipengaruhi oleh pendekatan klasik yang menekankan efisiensi, struktur organisasi, pembagian kerja, dan pengendalian birokrasi. Tokoh-tokoh seperti Woodrow Wilson, Max Weber, dan Frederick W. Taylor memberikan fondasi penting dalam pembentukan administrasi publik modern melalui gagasan tentang profesionalisme birokrasi, hierarki organisasi, spesialisasi kerja, dan rasionalitas dalam pemerintahan. Administrasi publik kemudian berkembang menjadi disiplin yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi organisasi, tetapi juga memperhatikan demokrasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

Salah satu teori penting dalam administrasi publik adalah teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber. Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional untuk menjalankan pemerintahan modern karena memiliki struktur hierarkis yang jelas, aturan formal, pembagian tugas yang spesifik, serta sistem rekrutmen berdasarkan kompetensi. Menurut Weber, birokrasi mampu menciptakan stabilitas, konsistensi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur negara bekerja berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga keputusan tidak dipengaruhi oleh hubungan

pribadi atau kepentingan individu. Teori birokrasi juga menekankan pentingnya profesionalisme pegawai negeri agar pelayanan publik dapat diberikan secara objektif dan adil. Walaupun demikian, birokrasi sering dikritik karena dianggap terlalu kaku, lambat, dan kurang responsif terhadap perubahan masyarakat. Struktur yang terlalu hierarkis dapat menciptakan proses administrasi yang berbelit-belit sehingga mengurangi efektivitas pelayanan publik. Kritik tersebut mendorong munculnya berbagai pendekatan baru yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil.

Perkembangan berikutnya melahirkan teori *New Public Management* (NPM) yang mulai populer sejak tahun 1980-an. Teori ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang dianggap tidak efisien dan terlalu prosedural. New Public Management mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam pengelolaan sektor publik, seperti efisiensi, pengukuran kinerja, orientasi hasil, kompetisi, dan pelayanan yang berfokus pada kepuasan masyarakat. Pemerintah didorong untuk bekerja lebih profesional, inovatif, dan hemat biaya melalui penerapan sistem evaluasi kinerja serta penguatan akuntabilitas publik. Pendekatan ini juga menekankan desentralisasi kewenangan dan pemberian otonomi yang lebih luas kepada unit-unit pelayanan publik agar mampu mengambil keputusan secara cepat dan efektif. Melalui teori ini, masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus memperoleh pelayanan berkualitas tinggi dari pemerintah. Walaupun berhasil meningkatkan efisiensi di banyak negara, pendekatan New Public Management juga mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan logika pasar dan efisiensi ekonomi sehingga berpotensi mengurangi nilai-nilai keadilan sosial, pemerataan pelayanan, dan tanggung jawab negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah.

Digital Governance

Digital Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Konsep ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya. Digital Governance tidak hanya berkaitan dengan penggunaan komputer atau internet dalam administrasi pemerintahan, tetapi mencerminkan transformasi menyeluruh terhadap sistem kerja birokrasi, proses pengambilan keputusan, serta mekanisme pelayanan publik berbasis teknologi digital. Pemerintah yang menerapkan Digital Governance berupaya menciptakan sistem administrasi yang lebih cepat, akurat, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, berbagai layanan publik seperti administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan usaha, kesehatan, pendidikan, dan

pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus melalui prosedur manual yang panjang dan rumit. Digital Governance juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui akses informasi yang lebih luas serta peningkatan partisipasi publik dalam proses pemerintahan (Sapthu et al., 2024).

Perkembangan Digital Governance dipengaruhi oleh perubahan paradigma administrasi publik modern yang menuntut pemerintahan lebih responsif, adaptif, dan inovatif. Pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai regulator dan penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan tata kelola yang kolaboratif dan berbasis data. Digital Governance memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih tepat karena didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dan data yang diperoleh secara real-time. Teknologi seperti big data, cloud computing, artificial intelligence, blockchain, dan Internet of Things mulai digunakan untuk mendukung proses administrasi dan pelayanan publik. Penggunaan sistem digital membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat, memonitor pelaksanaan program, mendeteksi penyimpangan anggaran, hingga mengevaluasi efektivitas kebijakan secara lebih cepat dan akurat. Perubahan ini mendorong birokrasi menjadi lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.

3. METHODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (explanatory research design) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilu pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Jenis data yang digunakan adalah data panel (gabungan data time series dan cross section), dengan satuan analisis mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku dalam tiga periode penyelenggaraan pemilu nasional terakhir (tahun 2014, 2019, dan 2024).

Pendekatan data panel dipilih karena mampu menangkap variasi antarwilayah (cross-section) dan antarwaktu (time series), sehingga memberikan estimasi yang lebih efisien serta mengendalikan pengaruh heterogenitas tak teramati antar daerah (Baltagi, 2021; Wooldridge, 2010). Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi determinan ekonomi dan kelembagaan yang berpengaruh terhadap variasi biaya per pemilih (cost per voter) antar kabupaten/kota di Maluku.

Teknik Analisis Data

Untuk melihat anggaran penyelenggaraan pemilu pada Kabupaten/Kota di provinsi Maluku, digunakan model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (i)$$

Where:

1. Y_{it} = Biaya per Pemilih Kab/Kota
2. X_{1it} = Kepadatan Penduduk Kab/Kota
3. X_{2it} = Tingkat Digitalisasi Proses Pemilu Kab/Kota
4. X_{3it} = Kompetisi Pengadaan Kab/Kota
5. α = Constant
6. $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Regression coefficients
7. ε_{it} = Error term

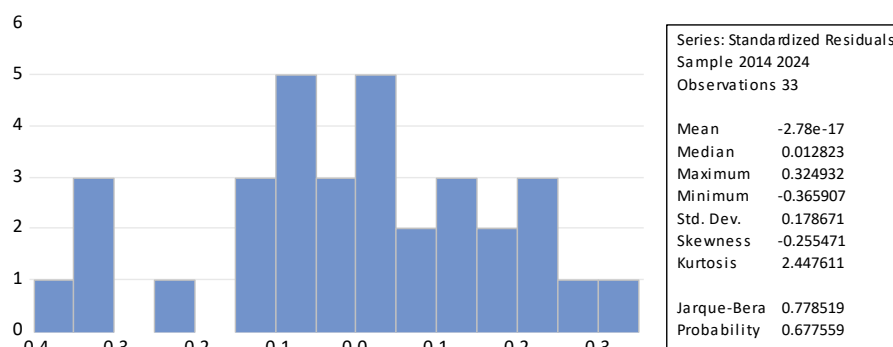
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Panel

Analisis data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kepadatan penduduk, tingkat digitalisasi proses pemilu, dan kompetisi pengadaan terhadap biaya per pemilih di setiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku selama tiga periode pemilu (2014, 2019, dan 2024). Terdapat tiga pendekatan umum dalam estimasi model data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai $p\text{-value} < 0,05$, yang berarti model Fixed Effect lebih sesuai dibandingkan dengan model Common Effect. Selanjutnya, hasil uji Hausman juga menunjukkan nilai $p\text{-value} < 0,05$, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa Random Effect lebih efisien ditolak. Dengan demikian, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM), karena mampu menangkap heterogenitas karakteristik antar kabupaten/kota yang bersifat tetap namun tidak teramati (seperti kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, dan struktur biaya logistik).

Uji Asumsi Klasik



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Residual pada Model Fixed Effect.

Hasil uji normalitas pada model Fixed Effect menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Nilai Jarque–Bera sebesar 0,778 dengan probabilitas 0,678 ($> 0,05$) menandakan tidak ada pelanggaran terhadap asumsi normalitas. Distribusi residual terlihat simetris dengan mean mendekati nol dan skewness 0,245, menandakan tidak ada kemiringan ekstrem. Dengan demikian, model Fixed Effect memenuhi asumsi klasik normalitas residual, sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara valid secara statistik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Fixed Effect bebas dari gejala heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas, sehingga asumsi klasik terpenuhi. Kondisi ini menandakan bahwa varians residual antar unit dan antar waktu bersifat homogen, tidak terdapat pola korelasi serial, serta hubungan antar variabel independen tidak saling tumpang tindih secara berlebihan. Selain itu, model juga telah diestimasi menggunakan robust standard errors, sehingga hasil koefisien dan uji signifikansi tetap valid meskipun terdapat kemungkinan penyimpangan kecil pada struktur error.

Hasil Estimasi

Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM).

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-4.110711	0.042253	-6.620156	0.0168
X2	-2.568322	0.304952	-8.422048	0.0000
X3	-0.067513	0.070683	-0.025157	0.8515
C	24.26974	4.401779	5.513620	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.929673			
Adjusted R-squared	0.918316			
F-statistic	1460.332			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source: Author elaboration, 2025

Hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi biaya per pemilih (Y) dengan sangat baik, ditunjukkan oleh nilai R-squared sebesar 0,9297 dan Adjusted R-squared sebesar 0,9183. Hal ini berarti sekitar 91,8% perubahan

biaya per pemilih dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu kepadatan penduduk (X1), tingkat digitalisasi proses pemilu (X2), dan kompetisi pengadaan (X3). Nilai F-statistic sebesar 1460,332 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota Provinsi Maluku.

Secara parsial, kepadatan penduduk (X1) dan tingkat digitalisasi proses pemilu (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya per pemilih, menandakan bahwa wilayah yang lebih padat dan lebih digital cenderung memiliki biaya pemilu yang lebih efisien. Sebaliknya, kompetisi pengadaan (X3) menunjukkan arah negatif tetapi tidak signifikan secara statistik, mengindikasikan bahwa tingkat persaingan tender belum cukup berperan dalam menekan biaya penyelenggaraan pemilu di wilayah kepulauan. Dengan demikian, efisiensi fiskal penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku lebih banyak ditentukan oleh faktor struktural dan kapasitas teknologi dibandingkan dinamika pasar pengadaan lokal.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku sangat dipengaruhi oleh faktor struktural wilayah dan kemajuan teknologi administrasi pemilu. Daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi cenderung memiliki biaya penyelenggaraan yang lebih efisien karena manfaat economies of scale—biaya tetap seperti logistik, pelatihan petugas, dan distribusi material dapat dibagi kepada lebih banyak pemilih. Sementara itu, penerapan sistem digital seperti Sirekap, Sidalih, dan e-procurement mampu mengurangi biaya transaksi, mempercepat alur kerja, serta meminimalkan kesalahan administratif. Temuan ini sejalan dengan prinsip efisiensi fiskal sektor publik, di mana optimalisasi sumber daya dan teknologi dapat menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan demokrasi.

Sebaliknya, tingkat kompetisi pengadaan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya pemilu di wilayah Maluku. Hal ini dapat dijelaskan oleh kondisi geografis kepulauan yang membatasi jumlah penyedia barang dan jasa lokal, sehingga pasar pengadaan cenderung bersifat oligopolistik. Dalam konteks ekonomi publik, situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum bekerja secara efisien untuk sektor pengadaan logistik pemilu di wilayah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi anggaran ke depan lebih mungkin dicapai melalui investasi pada digitalisasi dan konsolidasi logistik antarwilayah, bukan semata-mata melalui peningkatan jumlah peserta tender.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku terutama dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan tingkat digitalisasi proses pemilu, yang keduanya terbukti mampu menekan biaya per pemilih melalui mekanisme skala ekonomi dan efisiensi transaksi. Sebaliknya, kompetisi pengadaan belum memberikan pengaruh nyata terhadap efisiensi biaya karena keterbatasan pasar penyedia di wilayah kepulauan. Temuan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan efisiensi fiskal dalam penyelenggaraan pemilu tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi perlu difokuskan pada penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta koordinasi logistik antarwilayah agar prinsip *value for money* dalam tata kelola anggaran pemilu dapat terwujud secara berkelanjutan.

Saran

Direkomendasikan agar KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota fokus pada kebijakan peningkatan efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilu melalui dua jalur utama, yaitu penguatan infrastruktur digital dan optimalisasi tata kelola logistik antarwilayah. Digitalisasi sistem pemilu perlu diperluas melalui penerapan penuh Sirekap, Sidalih, dan e-procurement yang terintegrasi untuk menekan biaya administrasi dan meningkatkan transparansi fiskal. Selain itu, pemerintah daerah disarankan mendorong kolaborasi lintas wilayah dalam distribusi logistik pemilu agar tercipta skala ekonomi yang lebih besar, khususnya di wilayah kepulauan dengan akses transportasi terbatas. Di sisi lain, meskipun kompetisi pengadaan belum signifikan memengaruhi efisiensi biaya, pemerintah tetap perlu memperbaiki mekanisme pasar pengadaan melalui peningkatan transparansi, perluasan akses vendor, dan pengawasan yang ketat. Pendekatan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola anggaran pemilu yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Catindin, N. M., & Arnado, A. A. (2025). Transparency in Public Procurement and Its Impact on Sustainable Development Across Economic Growth, Environmental Protection, and Social Equity: A PLS-SEM Analysis. *International Journal of Sustainability Policy & Practice*, 21(2), 133.
- Clark, A. (2019). The cost of democracy: The determinants of spending on the public administration of elections. *International Political Science Review*, 40(3), 354–369.
- Coase, R. (1952). H., 1937, The Nature of the Firm. *Economica*, 4(16), 386405.

- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Garnett, H. A., & James, T. S. (2020). Cyber elections in the digital age: Threats and opportunities of technology for electoral integrity. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(2), 111–126.
- Grandia, J., & Meehan, J. (2017). Public procurement as a policy tool: using procurement to reach desired outcomes in society. *International Journal of Public Sector Management*, 30(4), 302–309.
- Hill, S. A. (2012). Election administration finance in California counties. *The American Review of Public Administration*, 42(5), 606–628.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- James, T. S. (2020). *Comparative electoral management*. Taylor & Francis.
- James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & Van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. In *International Political Science Review* (Vol. 40, Issue 3, pp. 295–312). Sage Publications Sage UK: London, England.
- James, T. S., & Jervier, T. (2017). The cost of elections: the effects of public sector austerity on electoral integrity and voter engagement. *Public Money & Management*, 37(7), 461–468.
- Melo, D. F., & Stockemer, D. (2014). Age and political participation in Germany, France and the UK: A comparative analysis. *Comparative European Politics*, 12(1), 33–53.
- Mohr, Z., Kropf, M., Pope, J., Shepherd, M. J., & Esterle, M. (2018). Election administration spending in local election jurisdictions: Results from a nationwide data collection project. *Paper for The*, 26–27.
- Nainggolan, F. G. (2020). Manajemen Distribusi Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017. *ELECTORAL GOVERNANCE JURNAL TATA KELOLA PEMILU INDONESIA Управлену: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 1(2).
- Norris, P. (2015). *Why elections fail*. Cambridge University Press.
- Norris, P., & Grömping, M. (2019). *Electoral integrity worldwide*.
- North, D. C. (2019). *Institutions, institutional change and economic performance*. Tantor Audio.
- Novianto, A. Y., Ak, S., Yenni Mairida, S., Wigati Iswandhiari, S. T., MM, D., Yelli Noviza, M. M., Lizawati, S. H., Aribeni, M., & Siti Nurhidaya, S. I. P. (n.d.). *Manajemen Pemilu: Teori, Praktik, dan Tantangan di Era Digital*. Penerbit Adab.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Putra, R. H., Mayako, P. A., Ferizko, A., Ginting, G. D. H., Dewi, Y. S., Darniyus, A.-A., Widia, J., Ilham, A. R., & Lubis, A. F. A. (2026). *PENGAWASAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK: MONITORING, EVALUASI, DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DEMOKRASI*. CV. Gita Lentera.
- RISAMASU, P. I. (2025). *DAMPAK VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA= THE IMPACT OF MACROECONOMIC VARIABLES ON HUMAN RESOURCE QUALITY IN EASTERN*

INDONESIA. Universitas Hasanuddin.

- Robinson, J. A., & Acemoglu, D. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty*. Profile London.
- Robinson, M. M., & Last, M. D. (2010). *A basic model of performance-based budgeting*. International Monetary Fund.
- Sapthu, A., Bugis, M., Serang, M. R., & Laitupa, A. A. (2024). ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU. *Jurnal Cita Ekonomika*, 18(1), 34–43.
- Shah, A., & Thompson, T. (2004). *Implementing decentralized local governance: a treacherous road with potholes, detours, and road closures* (Vol. 3353). World Bank Publications.
- Surbakti, R. (2013). *Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum*.
- Thai, K. V. (2017). *International handbook of public procurement*. Routledge.